

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Fahmi (2012:2) Kinerja Keuangan adalah ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53 menjelaskan bahwa “Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan serta pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah. PAD merupakan pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan belanja modal. Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Berdasarkan panuturan diatas menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung-jawab kepada setiap daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Namun, pada realitanya tidak semua daerah mampu sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kondisi keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menggali semua kemampuan keuangan daerah, maka dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah atau perusahaan dalam mempertahankan keberhasilannya atau meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode

berikutnya. Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja dikatakan terlaksana baik atau buruk dapat dilihat dari pencapaian kerjanya.

Menurut Sularso dan Restianto (2011), dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan.

Darwanis dan Saputra (2014) menghasilkan penelitian yang menyatakan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja keuangan. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan adalah positif. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) menghasilkan penelitian bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan. Belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Penelitian ini sebelumnya oleh Puspitasari, Adiputra, dan Sulindawati (2015) menghasilkan penelitian tentang belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Belanja modal dapat berpengaruh langsung ke kinerja dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu belanja modal ke pendapatan asli daerah lalu ke pertumbuhan kinerja keuangan.

Tabel 1.1
Total pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2011-2020 (Rupiah) Belanja Modal & Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2020 (Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan (Rupiah)	Belanja Modal (Rupiah)	PAD (Rupiah)
2011	630.787.1	172.122.290	34.924.903
2012	712.495.8	191.926.273	31.916.549
2013	801.644.7	199.891.340	36.444.631
2014	869.305.1	201.494.580	61.634.810
2015	973.570.32	177.166.550	70.462.420
2016	1.057.674.38	198.781.600	80.850.840
2017	1.201.362.88	218.905.890	85.760.740
2018	1.202.432.47	191.868.190	80.481.170
2019	1.221.574.60	286.691.470	42.421.500
2020	1.175.132.46	202.098.220	81.737.440
Jumlah	9.845.979	2.040.946.403	606.635.003
Rata-rata	984.598	172.122.290	60.663.500

Sumber: badan pusat statistik kabupaten kerinci, 2020

Pada tabel 1.1 di atas diketahui bahwa RKKD Kabupaten Kerinci mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2011-2020, Pada tahun 2012 belanja modal meningkat sebesar Rp.172.122.290, PAD mengalami penurunan sebesar Rp. 31.916.549 disebabkan oleh karena belanja modal yang tinggi akan meningkatkan anggaran pendapatan suatu daerah dan total pendapatannya meningkat sebesar Rp.712.495 semakin besar belanja modal dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, maka pemerintah kabupaten tersebut total pendapatan keuangan daerahnya tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Kerinci)**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2011-2020 ?
2. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2011-2020 ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui belanja modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2011-2020.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2011-2020.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

1. Sebagai kontribusi yang lebih komprehensif, khususnya menyajikan bukti empirik mengenai strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan pengetahuan masyarakat mengenai masalah keuangan daerah.
3. Sebagai acuan bagi peneliti lainnya dibidang yang sama dan sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi penulis dalam meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir peneliti dalam mengungkapkan sesuatu secara ilmiah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ekonomi pembangunan yang sudah ada khususnya keuangan daerah yang terkait dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah demi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah demi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.